

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA INDONESIA

Akmal Hamsa

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

Changes in the educational system in Indonesia aim to meet the demands of the era, including the science and technology, economic, social, political advancements and society's structure. Education functions as an accelerator for such advancements so that it requires ideal programs. Subject matter teachers are expected to be able to understand and implement such programs in order to attain the advancements. However, in practice, there are a lot of constraints. Some constraints concern the human resources and this results in education of low quality. Such constraints can be overcome through a policy and strategy focusing on decentralization and autonomy in education. It is necessary to improve teacher professionalism by eliminating obstacles through teacher trainings to get rid of personal, economic, structural, social, and cultural constraints. To do so, it needs the government's political will, teacher commitment, and society involvement.

Keywords: improvement, professionalism

A. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia sudah sering mengalami perubahan. Hal ini tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan jaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik, struktur masyarakat dan sebagainya. Walaupun ada anggapan yang berbanding terbalik dalam arti di satu pihak, pendidikan sebagai penggerak lajunya motor ilmu pengetahuan dan di lain pihak ada anggapan bahwa motor penggerak itu selalu lambat dalam penerapannya.

Namun demikian, perlu diakui bahwa perbaikan tetap dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai negara berkembang selalu berusaha meningkatkan pengembangan pendidikan baik di SD, SLTP, maupun SLTA. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 (yang disempurnakan 1986), kemudian disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1994, dan kini diganti dengan kurikulum 2004, yang dikenal dengan "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)". (sebagai pengganti kurikulum 1994). Kurikulum 2004 sebenarnya

sudah dipersiapkan tahun 1999 yang didorong oleh kebijakan dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang dituangkan dalam peraturan perundangan, seperti Tap MPR No. XV tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Undang-Undang R.I. No. 222/1999 tentang "Pemerintah Daerah"; Undang-Undang R.I. No. 25/1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah", serta Undang-Undang No. 20/2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Kurikulum baru ini sudah diujicobakan pelaksanaannya tahun 2000 pada kalangan terbatas dan secara resmi diberlakukan tahun 2004. Dalam tahap perkembangan selanjutnya, kurikulum tersebut diberlakukan secara luas pada setiap sekolah tahun 2006, yang kemudian dikenal sebagai "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan" (KTSP), yaitu kurikulum yang disusun berdasarkan kompetensi bersifat nasional

dengan menambah muatan materi tertentu sesuai dengan kebutuhan sekolah dan daerah tempat pelaksanaannya.

Yang dituntut dalam dunia pendidikan, khususnya yang dicantumkan dalam program pendidikan, misalnya kurikulum pastilah yang serba ideal. Oleh karena itu, dapat dipahami kalau pada kurikulum tersebut terdapat uraian terinci tentang masalah-masalah pendidikan yang harus diperhatikan, seperti deskripsi tujuan pendidikan nasional, deskripsi tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran, pokok bahasan, kegiatan pembelajaran, jumlah jam tatap muka, sumber kepustakaan, dan sebagainya. Semua yang serba ideal itu sudah tentu harus dapat ditafsirkan dan diterapkan oleh guru bidang studi (sebagai titik sentral dalam mengoperasikan pendidikan, khususnya yang tercantum dalam kurikulum dalam proses pembelajaran di kelas). Bila guru bidang studi mampu menafsirkan dan melaksanakan program pendidikan, terutama yang tercantum dalam kurikulum tersebut secara konsekwen dan konsisten, maka program pendidikan barulah mencapai sasaran.

Bisa diyakini bahwa ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pendidikan selama ini, terutama yang tercermin dalam kurikulum. Hal ini sebagian terbesar terdapat pada guru bidang studi sebagai ujung tombak pelaksanaan program pendidikan itu di lapangan. Oleh karena itu, untuk tidak mengulangi segala kekurangan dan kelemahan pada program pendidikan yang lalu, seperti yang tampak pada kurikulum 1994, maka dalam mewujudkan program pendidikan, terutama melalui kurikulum 2004 berbasis kompetensi yang sudah mulai diterapkan saat ini, profesionalisme guru perlu dipersiapkan secara matang dan ditingkatkan. Yang saat ini, kebijakan dan strategi desentralisasi dan otonomi bidang pendidikan nasional lebih banyak diserahkan pada daerah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang dapat dijadikan sebagai suatu masukan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, yang sedang menjadi fokus perhatian dan peningkatan pemerintah saat ini.

B. I S U P E N G E M B A N G A N M A N A J E M E N G U R U S E C A R A N A S I O N A L

Perubahan penataan manajemen pemerintahan tentu berakibat pula pada penataan manajemen pendidikan. Dasar penataan itu adalah berlakunya UU No.2 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa desentralisasi adalah suatu azas dan proses pembentukan otonomi daerah dan atau penyelenggaraan wewenang pemerintah di bidang tertentu oleh pemerintah pusat (Bafadal, 2001). Sejalan dengan itu, ditegaskan pula bahwa otonomi daerah adalah kewenangan dan kebebasan daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun semua kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, kewenangan itu mempunyai perkecualian, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasa 7). Bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah secara otonom yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

Departemen Pendidikan Nasional (2004: 2) menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor pemerintahan didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah bidang pendidikan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, serta pemerataan dalam rangka pemberdayaan seluruh potensi daerah yang beragam sehingga menjadi kekuatan yang sinergis. Untuk itu, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan dalam pelayanan bidang pendidikan nasional kepada daerah otonom secara utuh mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendaliannya di lapangan, dengan tetap memelihara terjalinnya hubungan yang serasi antara kebijakan pusat, daerah, dan antar daerah.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa desentralisasi bidang pendidikan nasional bertujuan mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada prakarsa dan aspirasi masyarakat melalui upaya-upaya memberdayakan, menghimpun, serta mengoptimalkan berbagai potensi daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri serta mengamankan prioritas nasional dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta pembangunan sektor pendidikan nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional.

Untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang lebih baik, maka strategi desentralisasi perlu diarahkan pada penanganan beberapa isu kebijakan yang strategis. Salah satu isu strategis tersebut adalah “Peningkatan Manajemen Guru secara Nasional”. Dalam kaitan ini, Depdiknas (2004:18) menegaskan bahwa pengelolaan guru secara nasional memegang peranan vital dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Perlu dilakukan kajian-kajian yang sistematis dan menyeluruh terhadap pengelolaan guru dari mekanisme yang berlaku sekarang. Pengelolaan guru tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian guru, tetapi yang lebih penting adalah pemberdayaan jabatan guru sebagai jabatan profesional. Pengelolaan guru profesional akan menyangkut standar kompetensi, standar profesi, perlindungan hukum, uji profesi dan sertifikasi, institusi pengelola, organisasi profesi yang akan mendukung berkembangnya kemampuan profesi guru secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa desentralisasi bidang pendidikan nasional adalah suatu upaya mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat berlandaskan prakarsanya sendiri. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan nasional cukup kompleks karena ada berbagai hal yang perlu dikaji lebih jauh. Salah satu isu strategis

yang perlu mendapat perhatian adalah “Peningkatan Manajemen Guru secara Nasional”. Mudah dipahami mengapa hal ini menjadi begitu penting diperhatikan, karena secara empiris mutu pendidikan kita memang sangat rendah dan mutu pendidikan yang rendah mencerminkan mutu para pendidik atau guru yang rendah pula. Isu ini perlu disikapi secara serius karena guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan; upaya-upaya alternatif untuk meningkatkan mutu profesionalitas guru perlu dipikirkan oleh semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan sudah tentu guru itu sendiri.

C. SYARAT KEBERHASILAN GURU BAHASA INDONESIA SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL

Ada banyak hal yang menentukan keberhasilan pendidikan yang sudah diprogramkan pemerintah. Hal tersebut antara lain, pengelolaan pendidikan secara nasional, pengelolaan persekolahan, administrasi, pembiayaan, kurikulum, guru, dan masyarakat (misalnya orang tua). Secara operasional, kurikulum dapat dikatakan mempunyai kedudukan sentral sebagai suatu rujukan dan kurikulum itu sendiri tidak akan berarti bila tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. Hal ini mengisyaratkan bahwa guru sebagai perangkat operasional di lapangan dituntut mempunyai mutu profesionalitas.

Dalam pandangan yang sederhana, guru profesional adalah guru yang mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau yang diakui pemerintah. Guru di SD/MI adalah guru kelas yang mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar multi mata pelajaran. Guru yang mengajar di sekolah menengah adalah guru mata pelajaran yang mempunyai kompetensi mengajar mata pelajaran. Suparno (2000) menambahkan bahwa dulu guru merupakan aktor utama dalam kelas, bukan siswa. Pembelajaran sebagai suatu indoktrinasi, peserta didik harus menerima segala sesuatu

yang diajarkan guru. Pada era globalisasi sekarang ini, guru dituntut keprofesionalannya. Mereka dituntut untuk dapat menyusun dan membuat rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa sehingga siswa mampu mencari dan menemukan ilmu pengetahuannya sendiri.

Sejalan dengan dengan pandangan Suparno, Adams dan Decey (dalam Usman, 1990: 7) mengatakan bahwa perkembangan baru terhadap pengajaran membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar sebagian ditentukan oleh kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan secara efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Peran guru dan kompetensi guru menyangkut banyak hal, antara lain sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspreditor, perencana, supervisor, motivator, penanya, evaluator, dan konselor. Dari peranan dan kompetensi tersebut, pada kenyataannya terpadu dalam penampilan guru yang manunggal dan terintegrasi. Hal ini tampak mulai dari perencanaan, proses belajar mengajar, hingga evaluasi.

Kini kita berada dalam abad pengetahuan, pembenahan, reformasi atau malah revolusi pendidikan dan pembelajaran guna mendapatkan karakteristik pendidikan dan pembelajaran abad pengetahuan dapat berlangsung dan berhasil dengan baik bila terdapat guru-guru yang mempunyai keprofesionalan yang tinggi. Dengan kata lain, bahwa guru profesional merupakan prasyarat strategis dalam perbaikan dan keberhasilan signifikan pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan pandangan tersebut, Saryono (2002) merumuskan bahwa bahwa guru yang profesional akan senantiasa (a) memperbaharui dan mengkualifikasi keprofesionalan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, (b) menyesuaikan kualifikasi profesional mereka agar sesuai dengan tuntutan yang ada, (c)

meningkatkan kompetensi keilmuan mereka agar tidak ketinggalan, (d) penuh etos kerja dan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki dan meningkatkan bidang keahlian mereka, (e) memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi demi kemajuan bidang profesi mereka, (f) memiliki semangat pengabdian yang tinggi demi kesejawatan yang tinggi untuk secara bersama-sama kolega mereka meningkatkan bidang kerja mereka, dan (h) selalu mengembangkan diri secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dengan sejumlah karakteristik profesionalitas tersebut, guru diyakini mampu dan berdaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran sehingga sesuai dan cocok dengan kebutuhan abad pengetahuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam “Kebijakan dan Strategi Desentralisasi dan Otonomi Bidang Pendidikan Nasional” yang diprogramkan Depdiknas (2004: 11) ditegaskan bahwa untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik, maka penanganan isu-isu strategis (salah satunya isu tentang peningkatan manajemen guru secara nasional). Sebagian isu (termasuk tentang peningkatan manajemen guru secara nasional) merupakan kebijakan bersifat struktur karena menyangkut perubahan nilai, sikap, perilaku yang berkembang dalam sejarah peradaban, dan untuk menanganinya memerlukan waktu yang tidak singkat. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan proses pembentukan *mind set* baru pada aparat pendidikan dan masyarakat pada umumnya, baik pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan pelayanan secara lebih efektif, efisien, bermutu, serta berkeadilan. Perubahan *mind set* ini tidak hanya dapat dilakukan oleh departemen atau sektor, tetapi memerlukan upaya antar-fungsi pemerintahan dalam suatu perencanaan nasional terpadu dan berjangka panjang.

Beranjak dari uraian tersebut, maka dalam perkembangan otonomi daerah dan globalisasi saat ini dan di masa yang akan datang, guru tidak hanya dituntut mempunyai profesionalitas dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang diperolehnya dari pendidikan formal tetapi juga harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri sesuai dengan situasi sosial dan perubahan sosial sehingga mampu berperilaku dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang profesinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Hamijoyo (2002) bahwa peran guru memang banyak bersifat ilmiah akademis, tetapi tidak semuanya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tetap berpegang pada kaidah-kaidah profesional yang menjadi ciri khasnya. Guru harus memperhitungkan kebutuhan atau masalah-masalah sosial yang berpengaruh terhadap sekolah bahkan terhadap pendidikan sebagai pranata sosial yang ada kaitannya dengan pranata-pranata sosial lainnya.

Oleh karena masalah guru menyangkut masalah yang luas dan menyangkut bangsa dan negara, peningkatan mutu profesionalitas guru merupakan masalah nasional yang ditangani secara terpadu oleh berbagai sektor dan departemen secara berkesinambungan. Hal sejalan juga dikatakan Saryono (2002) bahwa pembentukan, pengembangan, pembinaan, dan peningkatan mutu profesionalisme guru, *conditio sine non*, bagi semua pihak yang terlibat, berkepentingan, bersangkutan, dan peduli dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran; baik bagi pribadi guru sendiri, bagi masyarakat maupun bagi pemerintah atau negara.

D. MUTU PROFESIONALITAS GURU BAHASA INDONESIA

Keberhasilan pendidikan pada suatu sekolah akan menjadi berita yang luar biasa dan orang tua secara beramai-ramai ingin memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, walaupun "biayanya mahal". Hal ini menunjukkan bahwa ketidakberhasilan pendidikan di Indonesia sudah merupakan hal biasa dan umum di rasakan oleh masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa masyarakat sudah memahami betul bahwa mutu pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia rendah dan sangat

sulit mencari sekolah yang relatif bermutu.

Bukan hanya sinyalemen, tetapi berbagai fakta menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan terutama pembelajaran di Indonesia memang rendah, bahkan sangat rendah. Saryono (2002) mengungkapkan bahwa data *Human Development Index (HDI)* tahun 1999 s.d. 2001 menempatkan Indonesia pada posasi antara 105 s.d. 109 di antara 175 negara, jauh di bawah tiga negara tetangga. Hasil Survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang berpusat di Hongkong menunjukkan bahwa di antara 12 negara yang disurvei, sistem dan mutu pendidikan Indonesia menempati urutan terakhir (12), di bawah Vietnam. Dengan asumsi yang dapat dipercaya akurasinya, data-data EBTANAS selama 10 tahun lebih, juga menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa-siswa Indonesia tergolong rendah. Berbagai sinyalemen dan dugaan banyak kalangan juga relatif senada. Jika semua data dan dugaan tersebut cermat dan benar, maka hal ini merupakan isyarat keterpurukan mutu pendidikan;

Ketidakterhasilan pendidikan itu diasumsikan karena ketidakmampuan guru menjawab persoalan-persoalan yang dituntut dalam dunia pendidikan, khususnya yang telah dituangkan dalam kurikulum. Sebagai contoh kurikulum bahasa Indonesia, yang berorientasi pendekatan komunikatif, dilaksanakan guru berdasarkan pendekatan struktural. Keadaan serupa kemungkinan besar terjadi juga pada berbagai bidang studi lain. Hal ini tercermin pada Kartono (2000) yang menyatakan bahwa pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa selalu terjadi kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan atau diidealkan dengan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, ada juga yang berpendapat berbeda, misalnya Drost (2000) yang mengatakan bahwa kurikulum kita terlalu tinggi levelnya, tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Materinya juga terlalu padat sehingga siswa kurang mampu menyerapnya. Kemudian, Adisusilo (2000) mengatakan bahwa dewasa ini dunia pendidikan terpuruk karena antara lain ilmu-

ilmu sosial hanya mengajarkan informasi, tidak membentuk watak, moralitas, sikap, atau proses berpikir peresta didik.

Setelah melihat data yang disampaikan, kita mungkin sepakat dengan yang dikatakan Saryono (2000) yang menyatakan bahwa keterpurukan pendidikan, khususnya mutu pembelajaran Indonesia merupakan isyarat rendahnya mutu dan prestasi pembelajaran Indonesia. Meskipun guru tidak dapat disalahkan begitu saja, karena persoalannya begitu kompleks, banyak yang berpendapat bahwa profesionalitas guru-guru Indonesia sangat kronis bila dibandingkan dengan guru-guru di negara lain.

Fakta kasat mata yang menyebabkan kurangnya profesionalisme guru di Indonesia, antara lain sebagai berikut. (a) Masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Di Madura sebagian besar guru MI berlatar belakang pendidikan pesantren dan di Jawa Timur masih banyak guru SLTP/MTs dan SMU diajar oleh lulusan perguruan tinggi ilmu murni, bukan lulusan keguruan. (b) Masih sangat banyak guru yang memiliki kompetensi (baik keilmuan maupun profesionalisme) rendah dan memprihatinkan. Uji kompetensi guru SLTP di Jakarta menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di bawah nilai rata-rata siswa mereka. Uji kompetensi guru SLTP tahun 2001 di Jawa Timur menunjukkan bahwa guru-guru 8 mata pelajaran (jumlahnya 2.400 orang) hanya mampu menjawab soal-soal EBTANAS (yang diperuntukkan bagi siswa mereka) sekitar 60%; hanya satu atau dua orang yang mampu menjawab 100%.

Namun demikian, bila diamati dengan sungguh-sungguh, ada cukup banyak guru yang mempunyai semangat pengabdian tinggi, tanpa menuntut misalnya UMR sebagaimana buruh; mereka memberikan darma baktinya yang terbaik kepada siswa dan masyarakat. Kemudian, banyak juga guru yang berusaha melanjutkan kuliah ketingkat yang lebih tinggi meskipun harus meminjam uang di koperasi dan sering terhambat oleh pihak-pihak yang semestinya mendukung mereka.

E. HAMBATAN PENGEMBANGAN MUTU PROFESIONALITAS GURU BAHASA INDONESIA

Setiap pergantian sistem pendidikan, khususnya kurikulum, pemerintah selalu berupaya meningkatkan mutu profesionalitas guru. Misalnya, dalam perwujudan kurikulum 1994, calon pengajarnya dipersiapkan melalui pendidikan prajabatan pendidikan sekolah dasar (PGSD) dan SLTP melalui program penyetaraan yang ditangani oleh Unit Program Jarak Jauh di bawah koordinasi Universitas Terbuka. Kemudian, guru-guru yang sudah mempunyai kualifikasi yang sesuai diberi penataran untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Walaupun demikian, tampak bahwa pengajaran berdasarkan kurikulum 1994 tidak juga mampu meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu profesionalisme guru masih tetap juga rendah dan berarti pula bahwa upaya peningkatan mutu profesionalitas guru yang dilakukan selama ini belum berhasil.

Kegagalan peningkatan mutu profesionalitas guru yang dilakukan pemerintah selama ini, khususnya yang melalui penataran menurut Soedijarto (2000) karena kebanyakan penataran bersifat masal, tidak didasarkan atas hasil evaluasi, supervisi, dan diagnosis kinerja guru. Akibatnya, banyak penataran yang tidak efisien dari segi dana, waktu, dan tenaga yang digunakan, dan tidak efektif dari segi peningkatan profesionalitas guru, perbaikan mutu, proses, dan hasil pendidikan.

Sementara itu, Saryono (2002) menegaskan bahwa kendala pengembangan dan peningkatan mutu profesionalisme guru Indonesia, di antaranya karena adanya kendala personal, ekonomis, struktural, sosial, dan kultural. Kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Kendala personal berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan potensi dan motivasi diri dan adanya rasa tidak berdaya dan tidak mampu mengembangkan profesi.

- b. Kendala ekonomis berupa terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri, amat rendahnya penghasilan sebagai guru sehingga memaksa mereka bekerja macam-macam, dan banyaknya pungutan dan pembiayaan kepada mereka sehingga mengurangi kemampuan secara ekonomis untuk mengembangkan profesi.
- c. Kendala struktural berupa banyaknya pihak yang mengatur dan mengawasi guru sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan tenang, rumitnya jenjang dan jalur pengembangan profesi dan karier sehingga mereka tidak berdaya, dan terlalu ketatnya dan kakunya berbagai aturan birokrasi yang mengikat guru sehingga mereka tidak mampu mengembangkan kreativitas dan motivasi.
- d. Kendala sosial berupa rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan profesi guru, dan kurangnya fasilitas sosial dalam mengembangkan profesi guru.
- e. Kendala kultural berupa rendahnya budaya kerja berorientasi mutu sehingga para guru bekerja seadanya, rendahnya budaya pembelajaran yang mengutamakan otonomi dan kedaulatan guru, dan kakunya budaya birokrasi pendidikan yang membuat guru sulit berkembang.

Berbagai kendala tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan juga dengan faktor-faktor lain di luar bidang pendidikan dan pembelajaran sehingga membuat guru-guru Indonesia tidak otonom, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tidak kreatif, dan tidak berdaya. Kondisi seperti ini memang kurang memberi peluang kepada guru-guru Indonesia untuk berkembang sehingga mutu profesionalitasnya rendah dan dapat diyakini bahwa itu pula yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

F. STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU PROFESIONALITAS GURU BAHASA INDONESIA

Pada bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa dalam perkembangan otonomi daerah dan globalisasi saat ini dan di masa yang akan datang, guru tidak hanya dituntut mempunyai profesionalitas dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang diperolehnya dari pendidikan formal, tetapi juga harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri sesuai dengan situasi sosial dan perubahan sosial sehingga mampu berperilaku dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang profesinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Hamijo (2000) bahwa peran guru memang banyak bersifat ilmiah akademis, tetapi tidak semuanya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tetap berpegang pada kaidah-kaidah profesional yang menjadi ciri khasnya. Guru harus memperhitungkan kebutuhan atau masalah-masalah sosial yang berpengaruh terhadap sekolah bahkan terhadap pendidikan sebagai pranata sosial yang ada kaitannya dengan pranata-pranata sosial lainnya.

Sementara itu, fakta dan data yang ada memperlihatkan bahwa mutu profesionalitas guru masih rendah dan belum mampu mengangkat mutu pendidikan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa guru belum sepenuhnya siap menghadapi dan memenuhi tuntutan perkembangan otonomi daerah dan globalisasi saat ini maupun di masa mendatang. Kurangnya mutu profesionalitas guru selama ini sehingga kurang mampu mendukung program pendidikan yang dilakukan pemerintah, antara lain karena kendala sistem penataran yang diberikan, personal, ekonomis, struktural, sosial, dan kultural. Guna mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalitas guru sudah barang tentu dilakukan dengan mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Penataran guru di samping bersifat massal, perlu juga dilakukan evaluasi, supervisi,

dan diagnosis kinerja guru secara individu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan penataran-penataran intensif secara massal, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kompetensi guru secara periodik misalnya melalui tes kompetensi khusus misalnya mengambil model pelaksanaan tes yang dilakukan di Jakarta atau Jawa Timur dengan materi yang bervariasi. Hal itu bisa dilanjutkan dengan supervisi secara periodik tentang cara kerja guru dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran. Semua ini dilakukan di samping untuk diagnosis, juga untuk uji kelayakan guru dan sertifikasi. Hal ini sangat relevan dengan sistem guru kontrak yang mulai dikembangkan pemerintah saat ini.

- b. Secara personal, guru harus dimotivasi untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan motivasi dan potensi diri untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan peluang kepada guru untuk kreatif misalnya menyediakan dana penelitian bagi penelitian kelas atau memberikan penghargaan tertentu bagi guru yang benar-benar berprestasi. Hal ini dilakukan secara terbuka dan berlaku untuk semua guru di manapun mereka melaksanakan tugas.
- c. Secara ekonomis, baik pemerintah maupun masyarakat harus bertekad sekaligus merealisasikan peningkatan gaji atau penghasilan guru, mengurangi berbagai pungutan, dan meningkatkan berbagai fasilitas yang memungkinkan guru berkonsentrasi pada profesinya.
- d. Secara struktural, pemerintah harus melakukan deregulasi peraturan yang mengatur guru, melonggarkan atau membebaskan guru agar berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran, dan memberikan kebebasan dan kedaulatan kepada guru untuk menjalankan profesinya.

- e. Secara sosial, masyarakat harus lebih banyak terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi guru dan harus lebih banyak lagi melakukan promosi guru.
- f. Secara kultural, harus dikembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, budaya pembelajaran berorientasi profesional, dan nilai-nilai profesi yang mengutamakan kejujuran.

Cara-cara peningkatan mutu profesionalisme guru sebagaimana yang disampaikan tersebut dapat dikatakan cukup relevan dengan kebijakan dan strategi desentralisasi dan otonomi bidang pendidikan yang sedang dikembangkan saat ini. Walaupun tidak sepenuhnya, sebagian besar alternatif dalam peningkatan mutu pendidikan yang disampaikan tersebut cukup realistis dan bisa dilaksanakan dan hanya diperlukan *political will* dan *kinerja* pemerintah, komitmen guru, dan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakannya. Bila ketiganya bersinergi dan berkomitmen memperhatikan, meningkatkan, dan mengembangkan profesionalitas guru, maka mutu pendidikan kita mendapat peluang untuk bisa sesuai dengan yang diharapkan.

G. PENUTUP

Sistem pendidikan di Indonesia sudah sering mengalami perubahan. Hal ini tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan jaman, IPTEK, poleksosbud, dan sebagainya. Walaupun ada anggapan yang berbanding terbalik dalam arti di satu pihak, pendidikan sebagai penggerak lajunya motor ilmu pengetahuan dan di lain pihak ada anggapan bahwa motor penggerak itu selalu lambat dalam penerapannya, perlu diakui bahwa perbaikan tetap dilakukan pemerintah.

Yang dituntut dalam dunia pendidikan, khususnya yang dicantumkan program pendidikan pastilah yang serba ideal. Bila guru bidang studi mampu menafsirkan dan melaksanakannya secara konsekwen dan konsisten yang serba ideal itu, maka barulah

program pendidikan yang serba ideal itu mencapai sasaran.

Berdasarkan berbagai pendapat dan fakta, terdapat kendala dalam pelaksanaan program pendidikan selama ini. Kendala itu sebagian terletak pada guru, yaitu mutu profesionalitas guru masih rendah sehingga berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Dalam mewujudkan program pendidikan, sesuai dengan kebijakan dan strategi desentralisasi dan otonomi bidang pendidikan yang dicanangkan pemerintah, profesionalisme guru perlu dipersiapkan secara matang dan ditingkatkan agar guru mempunyai profesionalitas dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang diperolehnya dari pendidikan formal dan mempunyai kemampuan menyesuaikan diri sesuai dengan situasi sosial dan perubahan sosial sehingga mampu berperilaku dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan profesinya.

Untuk meningkatkan profesionalitas guru tersebut, dapat dilakukan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada selama ini, yaitu hambatan yang ada pada model penataran guru, kendala personal, kendala ekonomis, kendala struktural, kendala sosial, dan kendala kultural. Walaupun tidak sepenuhnya, sebagian besar alternatif dalam peningkatan mutu pendidikan yang disampaikan tersebut cukup realistis dan bisa dilaksanakan dan hanya diperlukan *political will* dan *kinerja* pemerintah, komitmen guru, dan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakannya. Bila ketiganya bersinergi dan berkomitmen memperhatikan, meningkatkan, dan mengembangkan profesionalitas guru, mutu pendidikan kita secara bertahap mendapat peluang untuk bisa sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, J.R. Sutarjo. 2000. Pendidikan Nilai dalam Ilmu-Ilmu Sosial-Humaniora, dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed) *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*; hal.71-90. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Bafadal, Ibrahim. 2001. Kurikulum Pendidikan Nasional dalam Otonomi Pengelolaan Pendidikan. *Makalah* disajikan dalam Simposium dan Musyawarah Nasional Alumni Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 13 Oktober 2001.
- Depdiknas. 2004. *Kebijakan dan Strategi Desentralisasi dan Otonomi Bidang Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Drost, J. 2000. Proses Pembelajaran Masa Kini dan Masa Mendatang, dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed). *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*; hal. 45-57. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Hamijoyo, Santoso S. 2002. *Status dan Peran Guru, Akibat pada Mutu Pendidikan dalam Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Saryono, Djoko. 2002. Peningkatan Profesionalitas Guru (Indonesia) untuk Memasuki Abad Pengetahuan. *Makalah* disampaikan dalam seminar nasional “Menggagas Pendidikan Nasional Pasca Abad XX” di Universitas Muhammadiyah Malang, 3 Maret 2002.
- Suparno, Paul. 2000. Kurikulum Masa Depan dalam Sindhunata (Ed.) *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, Moh. Zuber. 1990. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.